

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp9,0 T (634,2%)
▼ -35,1% (yoy)

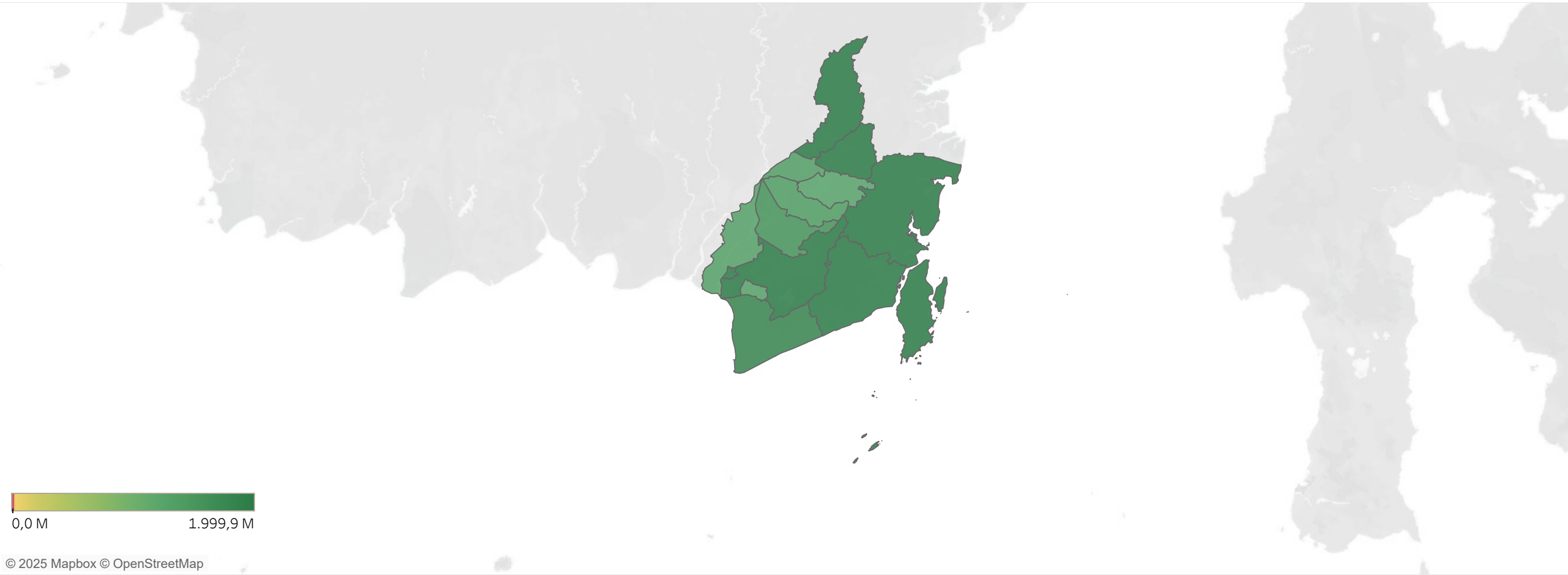
Belanja

Rp30,4 T (74,5%)
▲ 8,0% (yoy)

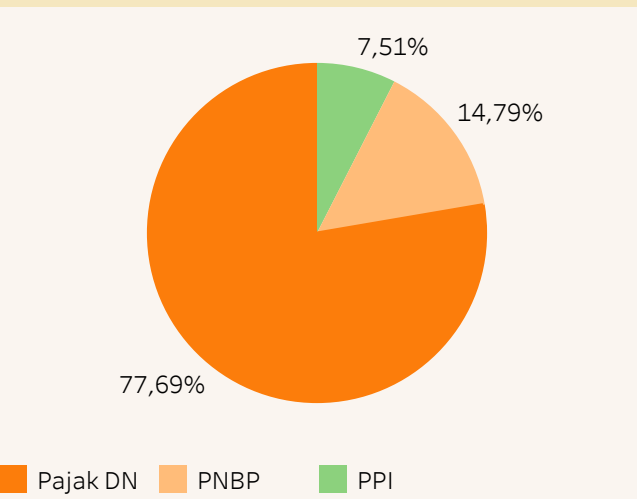
Defisit

Rp-21,4 T (54,3%)
▲ 50,2% (yoy)

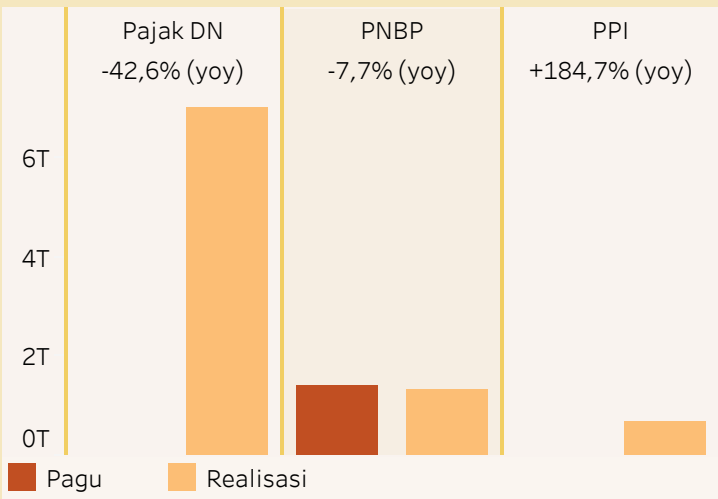
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



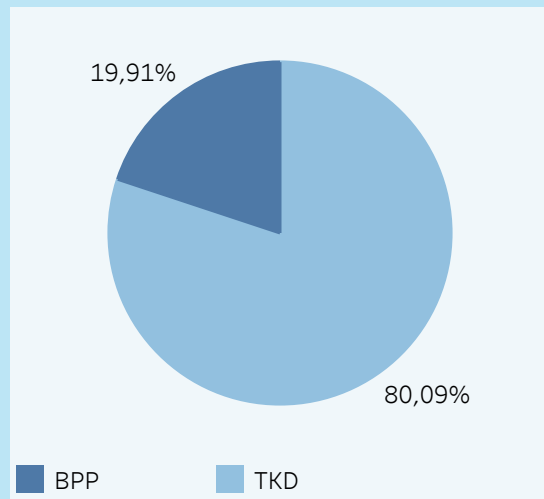
Persentase Komposisi Pendapatan



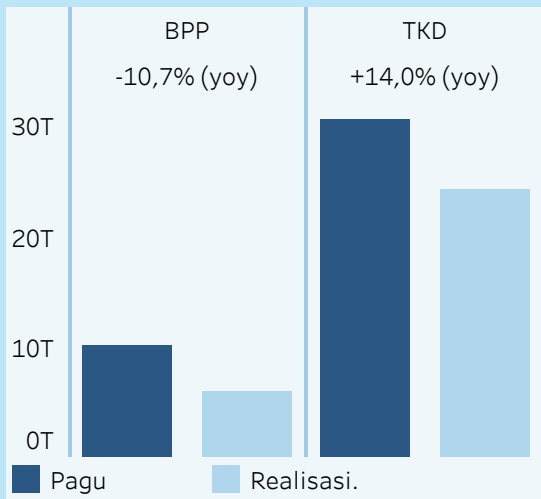
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



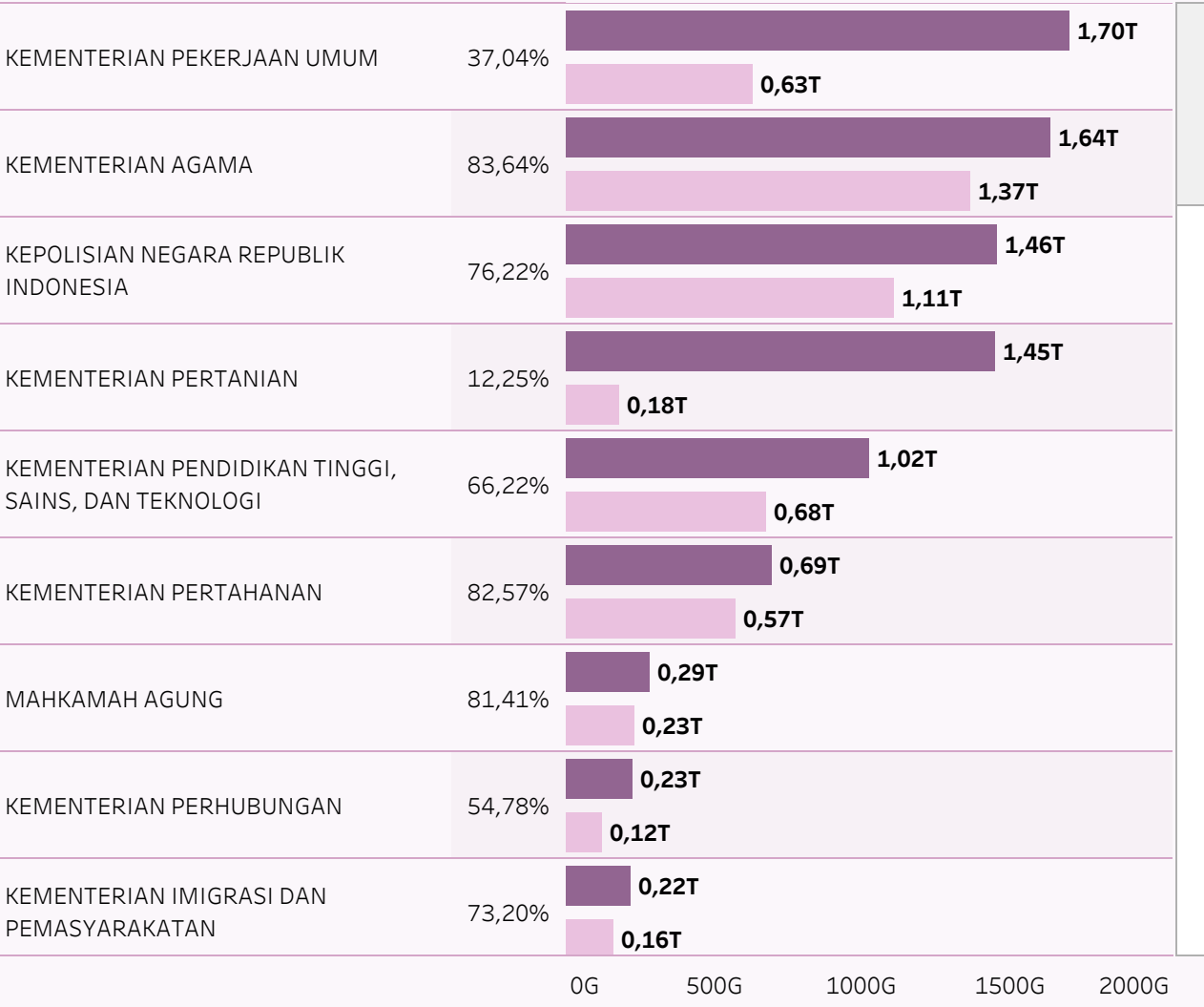
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	13,9T	9,0 T	▼ 35,12%
Grand Total	13,9T	9,0 T	▼ 35,12%

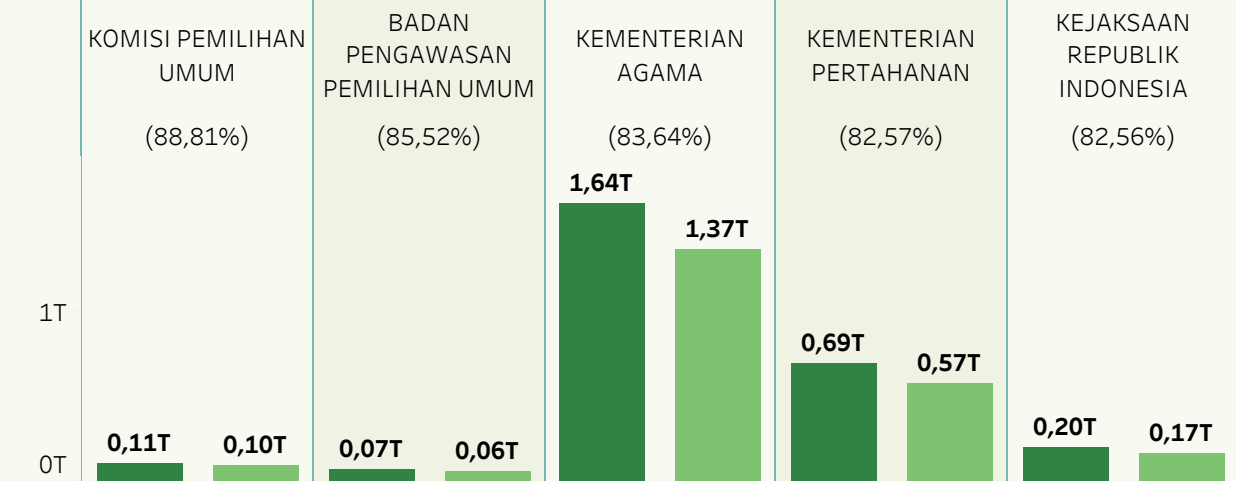
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	28,1T	67,5%	40,8T	30,4 T	74,5%	▲ 8,02%
Grand Total	41,7T	28,1T	67,5%	40,8T	30,4 T	74,5%	▲ 8,02%

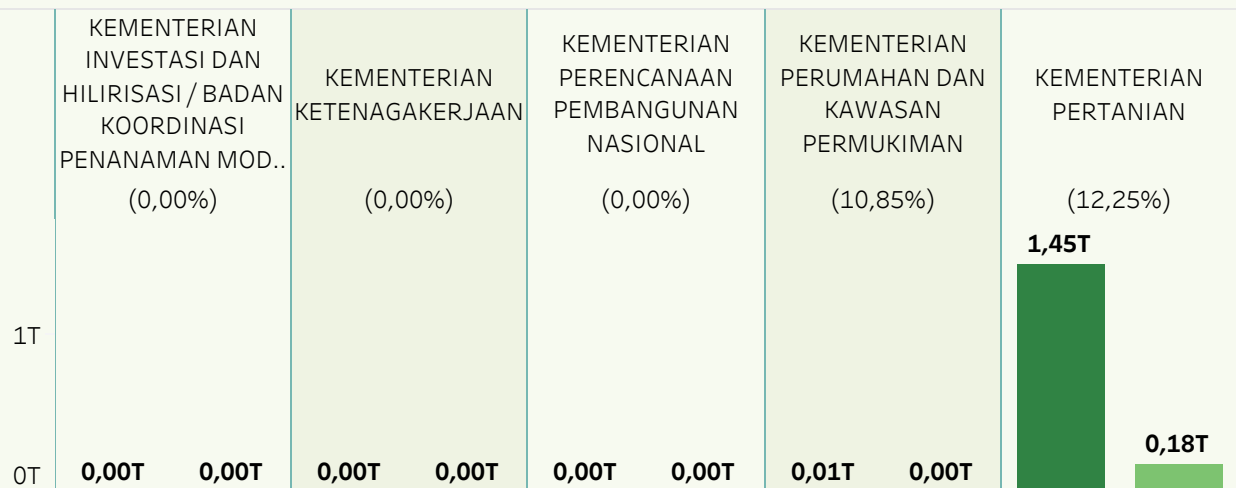
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



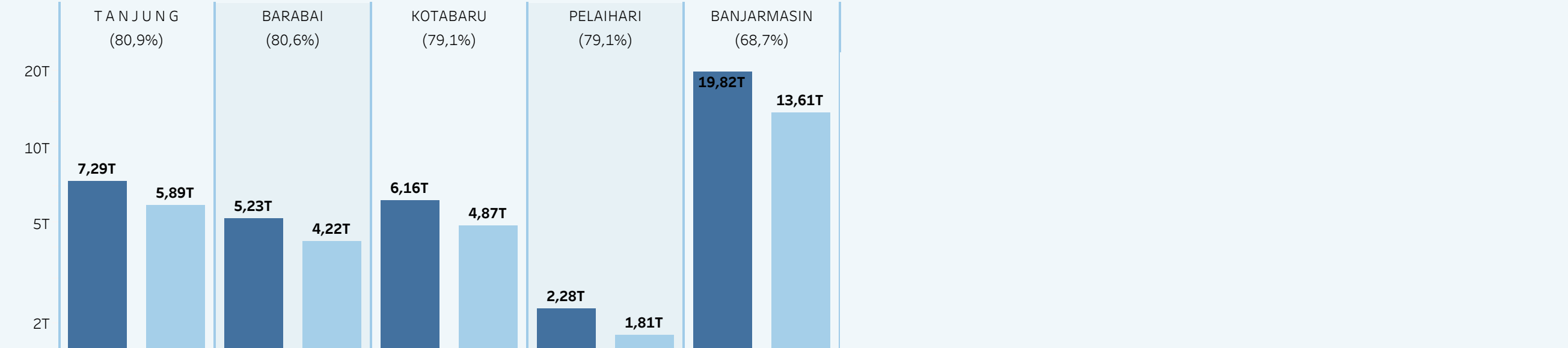
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



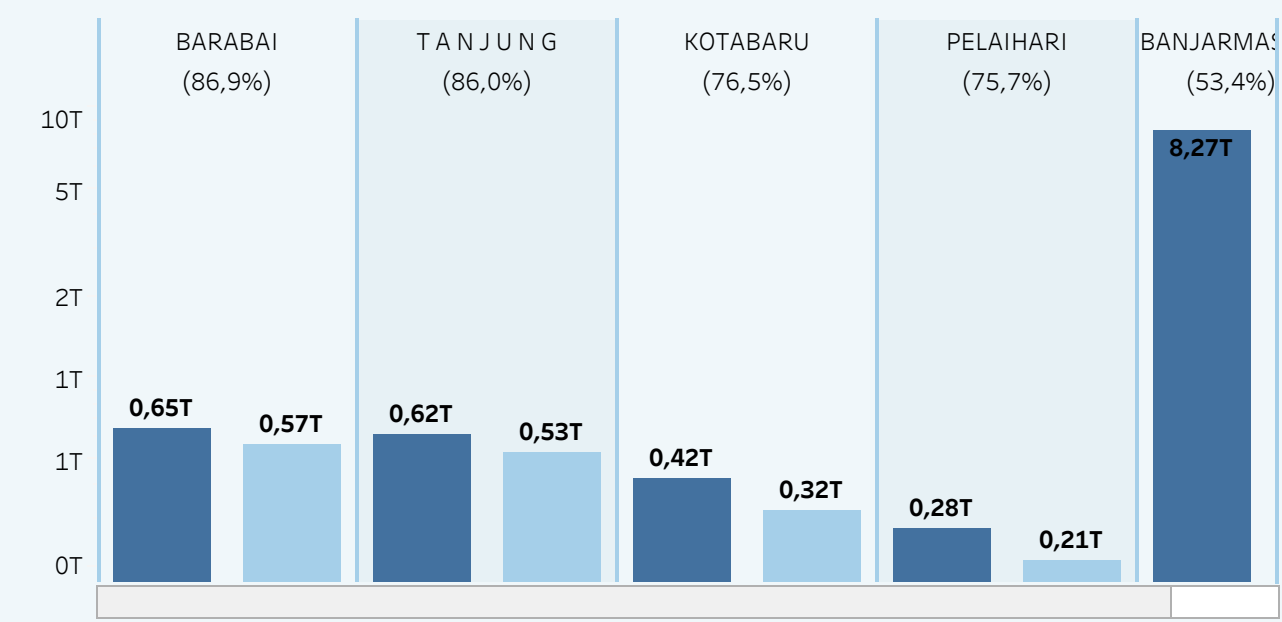
5 KL Persentase Realisasi Terendah



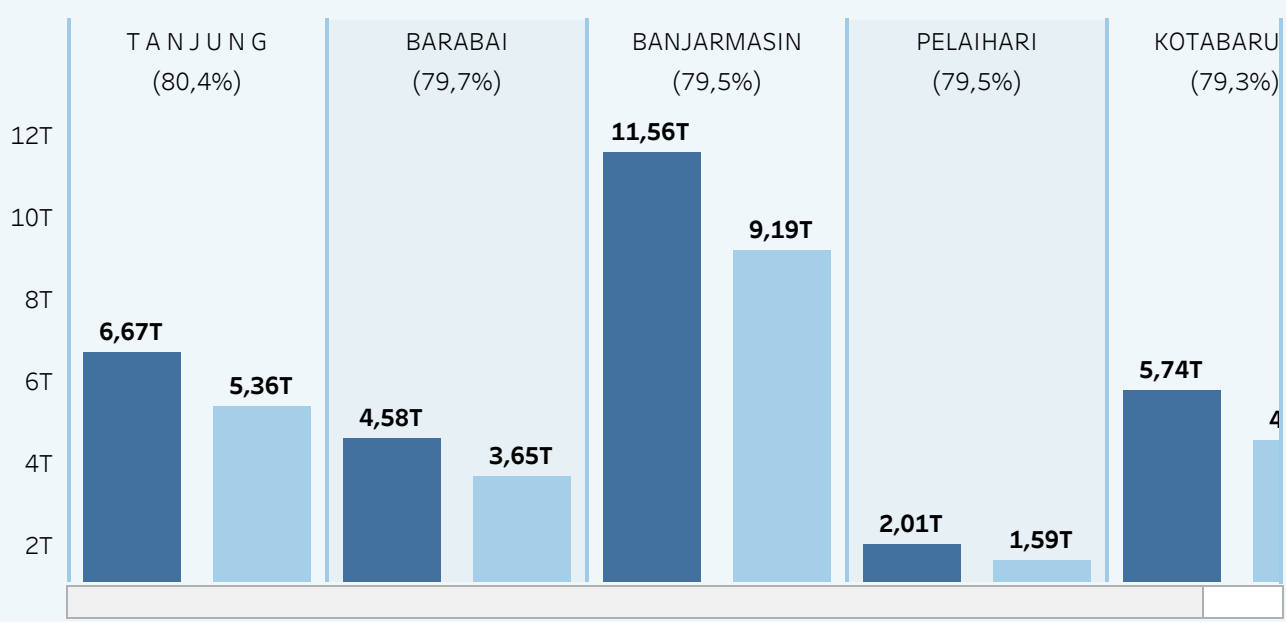
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 03 Oktober 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp9,03 Triliun (40,96% dari target), terkontraksi 35,12% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 34,44% (Rp7,01 Triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 261,24 % (Rp 678,61 Milyar), PNBPN mencapai 93,97% (Rp1,34 Triliun) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun. Pendapatan negara didominasi oleh Pajak (77,66%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 03 Oktober 2025

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp30,40 Triliun (74,52%) dari pagu Rp40,79 Triliun, tumbuh 8,00% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 59,11% (Rp.6,05) dari pagu Rp10,24 Triliun, terkontraksi 10,70% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 79,69% (Rp24,35 Triliun.) dari pagu Rp30,55 Triliun, tumbuh 13,94% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (80,09%).
2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu terbesar yaitu Rp1,70 triliun. Kinerja tertinggi pada 10 K/L besar terdapat pada Kementerian Agama dengan realisasi 83,64% (Rp1,37 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun.
3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** Komisi Pemilihan Umum merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu Rp99,21 miliar atau 88,81% dari pagu, dikontribusi oleh belanja barang (95,08% dari pagu atau sebesar Rp64,81 miliar). Sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja terendah Rp0,65 miliar atau 10,85% dari pagu, rendahnya realisasi dikontribusi oleh belanja barang (10,85% dari pagu atau sebesar Rp0,65 miliar).
4. **Kinerja KPPN,** KPPN Tanjung merupakan KPPN dengan realisasi tertinggi yaitu 80,90% (Rp5,89 triliun) dari pagu Rp7,29 triliun, didorong oleh kinerja belanja pegawai yang mencapai 95,44% (Rp405,84 miliar) dari pagu Rp425,22 miliar. Sementara, KPPN Banjarmasin merupakan KPPN dengan realisasi terendah yaitu 68,70 (Rp13,61 triliun) dari pagu Rp19,82 triliun, terutama dipengaruhi oleh rendahnya belanja modal yang baru mencapai 35,55%.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mengalami penurunan yang signifikan, dengan realisasi netto hingga tahun 2025 saat ini tercatat sebesar Rp2,13 triliun atau 32,46%, terkontraksi sebesar 14,02% secara year on year (YoY). Penurunan ini terutama disebabkan oleh merosotnya produksi serta harga batubara yang merupakan komoditas utama penopang perekonomian dan penerimaan pajak di Provinsi

Kalimantan Selatan.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

DJP perlu melakukan langkah diversifikasi basis pajak melalui optimalisasi sektor non-batubara seperti perkebunan, perikanan, industri manufaktur, serta sektor jasa yang potensial di Kalimantan Selatan. Selain itu, penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan berbasis data, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar sektor tambang, sehingga penerimaan pajak lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas batubara.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Masih lambatnya penyerapan anggaran kegiatan Bantuan Produk dan Peralatan pada satker BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI (239455) dengan target volume pengadaan kambing sebanyak 300 ekor dan bantuan ternak unggas sebanyak 36.000 ekor. Sampai saat ini realisasi baru Rp123 Juta (0,95%) dari alokasi pagu sebesar Rp12,90 M, masih rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan belum terbitnya juknis untuk penyaluran bantuan pemerintah dari pusat.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker perlu melakukan koordinasi intensif dengan unit eselon terkait, sekaligus menyiapkan langkah teknis seperti verifikasi calon penerima, identifikasi penyedia, serta kesiapan logistik sehingga pelaksanaan dapat segera berjalan begitu juknis diterbitkan, dengan tetap dilakukan monitoring berkala agar serapan anggaran mencapai target sesuai pagu yang telah ditetapkan.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Kinerja Program FLPP (s.d. 03 Oktober 2025) Terdapat kenaikan unit dibangun dari sebelumnya 15.045 unit menjadi 15.404 unit, jumlah lokasi tahun 2025 dari sebelumnya 140 lokasi menjadi 141 lokasi, jumlah penerima tahun 2025 dari sebelumnya 7.460 menjadi 7.970

Kanwil DJPb Prov Kalsel telah melaksanakan FGD Implementasi FLPP pada tanggal 25 September 2025 dengan melibatkan pihak dari Pemda, Perbankan, Asosiasi Pengembang, BPN, PLN, PDAM, serta perwakilan penerima manfaat

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall..

C | Koperasi Desa Merah Putih, Kinerja Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (s.d. 03 Oktober 2025) masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah Desa dan Kel yang Sudah Membentuk Koperasi Merah Putih dan Jumlah Koperasi Desa dan Kel yang Sudah Berbadan Hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

1. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) sebanyak 2.013 sudah maksimal seperti periode sebelumnya;
2. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) sebanyak 83;
3. Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif sebanyak 96;
4. Jumlah Koperasi Melakukan Permohonan Proposal Bisnis sebanyak 26;
5. Jumlah Permohonan Proposal Bisnis sebanyak 106.

Informasi Tambahan:

1. Sampai dengan 26 September 2025, seluruh KDMP dan KKMP di Provinsi Kalsel telah terbentuk dan sudah berbadan hukum sebanyak 2.013 KDMP/KKMP yang terdiri dari 2.012 koperasi baru dan transformasi koperasi sebanyak 1 koperasi.
2. Telah terbit Perkada/Pergub/Perbup/Perwalikota tentang penyelenggaraan KDMP (1 Provinsi, 9 Kab/Kota, dan 3 Kab/Kota masih proses penandatanganan).
3. Sampai dengan 26 September 2025, 81 KDMP/KKMP telah operasional (minimal 1 gerai) dan 1.932 KDMP/KKMP masih proses operasionalisasi.
4. Dari 2.013 KDMP/KKMP yang ada, direncanakan akan memerlukan 203 Business Assistant (BA) yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan masing-masing mengasistensi 8 s.d. 12 KDMP/KKMP.

D | Sekolah Rakyat, Kinerja Program Sekolah Rakyat (s.d. 03 Oktober 2025) menunjukkan terdapat peningkatan Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan sebanyak 2 SR dari periode sebelumnya 1 SR. Target Jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | SMA Unggul Garuda, Kinerja Program SMA Unggul Garuda (s.d. 03 Oktober 2025) menunjukkan progress pada SMAN Banua Dalam proses penyusunan Nota Kesepakatan antara Kemendikti Saintek dengan Gubernur Kalsel untuk program Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, Kinerja Program Revitalisasi Sekolah (s.d. 03 Oktober 2025) menunjukkan progres pelaksanaan. Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi. Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap lelang pekerjaan. Progres target 18 sekolah adalah 12 sekolah dalam tahap pembangunan, dan 6 masih dalam tahap lelang pekerjaan

G | Ketahanan Pangan, Kinerja Program Ketahanan Pangan (s.d. 03 Oktober 2025) menunjukkan terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp82,73 M (6,29%) menjadi Rp96,31M (7,32%)

H | Ketahanan Energi, Kinerja Program Ketahanan Energi (s.d. 03 Oktober 2025), Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

1. Kemanfaatan FLPP dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kemudahan kepemilikan, peningkatan kualitas hidup
2. Beberapa permasalahan yang masih ditemui di lapangan terutama terkait Perizinan yang melibatkan beberapa instansi dan dukungan fasilitas Listrik (PLN) dan Air (PDAM) untuk perumahan yang baru di beberapa lokasi.
3. Koordinasi yang masih kurang antar pihak yang terkait sehingga beberapa permasalahan yang timbul belum seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

1. Peningkatan kualitas koordinasi antar stakeholder untuk penerbitan perizinan.
2. Perlu komitmen pihak terkait untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang dihadapi

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

1. Telah ada pembagian wilayah untuk melakukan pendampingan langsung kepada KDMP/KKMP bagi BUMN di Kalimantan Selatan.
2. Progres pengajuan pinjaman ke perbankan: 13 KDMP/KKMP sedang diproses oleh BRI, sementara bank lainnya belum mengajukan.
3. Hasil rapat koordinasi terakhir antara KMD Provinsi dengan Kementerian Koperasi, ada rencana

hasil rapat koordinasi terakhir Satgas KMP Provinsi dengan Kementerian Koperasi, ada rencana pengalihan pegawai PPPK untuk menjadi BA di Kab/Kota.

4. Saat ini sedang dilakukan rekrutmen PMO KMP, di mana untuk masing-masing Kab/Kota sebanyak 2 orang dan Provinsi sebanyak 2 orang.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

1. Perlu adanya intervensi pemda untuk menyediakan/memfasilitasi tempat atau gerai koperasi
2. Pemda dan seluruh stakeholder (terutama BUMN) perlu bertindak proaktif sebagai fasilitator utama bisnis dari KDMP/KKMP.
3. Perlu penyamaan persepsi di kalangan perbankan untuk mendorong pinjaman kepada KDMP/KKMP dapat terealisasi segera. Misal: kemudahan pembukaan rekening, penilaian proposal, dan pemahaman PMK 49 Tahun 2025

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Terdapat wacana perubahan alokasi DIPA program sekolah rakyat semula teralokasi pada DIPA pusat menjadi DIPA vertikal yang akan dilaksanakan oleh satker BBPPKS dan Sentra Budi Luhur Banjarbaru

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan satker vertikal agar arah kebijakan tetap konsisten serta sesuai dengan tujuan program. Selain itu, perlu disusun mekanisme transisi yang jelas terkait pembagian tugas, kewenangan, serta alur pelaporan, guna mencegah tumpang tindih dan potensi keterlambatan pelaksanaan.

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan keunggulan SMA Garuda.
2. Persepsi keliru yang menyamakan SMA Garuda dengan SMA negeri biasa.
3. Preferensi masyarakat masih condong ke sekolah swasta ternama.
4. Citra SMA Garuda belum kuat karena masih tahap awal pengembangan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

1. Sosialisasi masif & terstruktur tentang visi, keunggulan, dan diferensiasi SMA Garuda.
2. Percepatan implementasi fitur unggulan seperti kurikulum berkualitas, guru unggul, dan fasilitas modern.
3. Kolaborasi strategis dengan tokoh masyarakat, media lokal, dan alumni untuk membangun citra positif.
4. Publikasi capaian siswa untuk menunjukkan daya saing dibanding sekolah swasta ternama dan pemberian insentif atau beasiswa bagi siswa berprestasi.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Pemda Kabupaten Balangan terlambat mengajukan usulan sekolah yang akan direvitalisasi dengan alokasi DIPA Disnakertrans Provinsi Kalsel.

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pemda Kabupaten Balangan agar segera melakukan persiapan pelaksanaan dan berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Kalsel.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Progres program cetak sawah masih lambat baik dari sisi output cetak sawah dan penyerapan anggaran hal ini dikarenakan kondisi lahan di beberapa wilayah berupa tanah gambut dalam atau lahan pasang surut yang memerlukan penanganan teknis lebih rumit.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Untuk lahan yang teridentifikasi berupa tanah gambut dalam atau pasang surut, perlu diterapkan teknologi khusus pengelolaan lahan (misalnya sistem tata air mikro, kanal blocking, dan teknik reklamasi lahan pasang surut) dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Pemda Kab Tapin menawarkan kepada investor terkait potensi Bendungan Tapin yang dibangun pada tahun 2021 untuk menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hydropower dengan kapasitas di atas 1 MegaWatt (MW).

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemda Tapin dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk memastikan integrasi hasil produksi listrik ke dalam jaringan nasional maupun regional.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG sebelumnya dari 113 menjadi 122, jumlah supplier sebelumnya 89 menjadi 92, dan penerima manfaat sebelumnya 338.867 menjadi 357.789 . Telah dilaksanakan survei serempak pada 5 SPPG di Kalsel pada tanggal 30 September 2025 sesuai ND Ditpa Nomor ND-1239/PB.2/2025

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Masih terdapat kendala dalam penyediaan bahan baku makanan dalam jumlah besar dan adanya pembatalan pengiriman bahan makanan oleh pihak pemasok pada hari H, sehingga Kondisi ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pendistribusian MBG ke sekolah.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Yayasan dan SPPG seharusnya melakukan diversifikasi pemasok dengan menjalin kerja sama lebih dari satu penyedia bahan pokok agar pasokan tetap terjaga, disertai penyusunan rencana kontinjensi berupa SOP penanganan darurat dan penyediaan stok cadangan bahan yang tahan lama. Selain itu, diperlukan kontrak kerja sama yang lebih ketat dengan klausul penalti untuk meningkatkan komitmen pemasok, serta optimalisasi sistem monitoring melalui pemesanan lebih awal dan koordinasi rutin guna mengantisipasi potensi keterlambatan sejak dini.